

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah menggambarkan bagaimana pelarangan TikTok oleh pemerintah India pada tahun 2020 yang merupakan tindakan politik kompleks dan sulit untuk dipahami semata-mata sebagai tanggapan teknokratis terhadap aplikasi asing. India telah memutuskan untuk melarang TikTok sebagai bagian dari strategi politik luar negeri yang lebih luas berdasarkan ketegangan geopolitik dengan Tiongkok dan keinginan nasional untuk memperkuat kedaulatan digitalnya dan bukanlah tindakan reaktif biasa dalam hubungan internasional kontemporer. Teori sekuritisasi Copenhagen School menunjukkan bahwa India telah menerapkan proses politik untuk mengubah masalah non-politik, seperti aplikasi media sosial, menjadi masalah keamanan nasional. TikTok telah dianggap oleh pemerintah India sebagai ancaman terhadap hal-hal penting, seperti data warga negara, kedaulatan digital, dan integritas nasional. TikTok tidak lagi dianggap sebagai aplikasi hiburan biasa, tetapi sebaliknya, dianggap sebagai alat untuk spionase, pengaruh ideologi, dan memperluas kekuatan digital Tiongkok yang berpotensi mengancam kedaulatan digital India.

Pelarangan TikTok menunjukkan bagaimana India memproyeksikan dominasinya di era teknologi. Dalam hal ini, kebijakan pelarangan berfungsi sebagai representasi kemandirian strategis India di

tengah persaingan antara Tiongkok dan negara-negara Barat untuk hegemoni teknologi. Selain itu, tindakan ini menunjukkan bahwa India telah memasuki fase baru dalam diplomasi digital, di mana masalah teknologi digunakan sebagai alat diplomasi dalam konteks politik luar negeri. India menunjukkan kemampuan dan keinginan politik untuk mengatur ruang digitalnya sendiri dengan menentang dominasi platform digital Tiongkok. Secara internal, larangan aplikasi TikTok sejalan dengan program seperti *Atmanirbhar Bharat*, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknologi nasional dan mengurangi ketergantungan pada produk asing. Kebijakan ini berfungsi sebagai bagian dari pertimbangan kekuatan strategis di Asia secara eksternal, terutama sebagai tanggapan terhadap ekspansi teknologi dan kekuatan digital Tiongkok yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelarangan TikTok menunjukkan penggunaan kekuatan digital sebagai alat politik di luar negeri dalam konflik geopolitik antara India dan Tiongkok.

5.2 Saran

Harapannya penelitian ini dapat menjadi pemahaman mengenai kebijakan India dalam merespon pengaruh aplikasi asing terhadap kedaulatan digital nasionalnya pada tahun 2020. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas penelitian dengan melihat bagaimana kebijakan digital negara-negara demokratis dan otoriter menangani penyebaran teknologi dari pihak asing. Penting untuk

melakukan penelitian tentang dinamika diplomasi digital, khususnya dalam konteks rivalitas kekuatan besar. Studi yang membandingkan India, Amerika Serikat, dan negara-negara Asia lainnya dapat membantu memahami lebih mendalam mengenai bagaimana teknologi digunakan sebagai alat kekuasaan dalam politik global kontemporer. Selain itu, dapat dipelajari bagaimana peran media dan masyarakat sipil menangani sekuritisasi digital dan bagaimana hal itu berdampak pada ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi.

